BAB V

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan perempuan di Indonesia bukan disebabkan karena ketiadaan sesuatu yang materi melainkan ketiadaan aksesibilitas kepada sesuatu yang materi. Pada dasarnya pembangunan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Praktik pembangunan yang tidak memperhitungkan makna dan nilai-nilai manusiawi harus ditiadakan guna menghindari terjadinya penderitaan atau kemiskinan bagi kelompok tertentu. Kemiskinan yang dialami perempuan terjadi karena mereka kurang dilibatkan dalam pembangunan. Ketidakterlibatan perempuan dalam keseluruhan pembangunan telah merusak kehidupan perempuan itu sendiri sebagai manusia yang bermakna dan juga proses demokratisasi di Indonesia. Perempuan kehilangan hak dan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Kebebasan belum sepenuhnya menyatu dalam diri perempuan. Karena itu, kebebasan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam perealisasian kapasitas-kapasitas dalam diri di setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik. Tindakan merealisasikan kemampuan dalam diri merupakan suatu bentuk tindakan mewujudkan esensi dan eksistensinya sebagai manusia.

Di Indonesia realitas ketidakadilan dalam pembangunan merupakan persoalan yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan dan penderitaan akibat praktik politik yang dominatif dan tidak khas gender mengakibatkan kemiskinan bagi kelompok tertentu menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan. Karena itu, realitas kemiskinan yang dialami oleh perempuan di Indonesia bukan karena ketiaadaan sesuatu yang materi melainkan karena ketiadaan kebebasan partisipasi dalam pembangunan. Hal ini ditandai oleh banyak kasus, di mana perempuan kurang dilibatkan dalam bidang politik. Data menunjukan bahwa adanya sedikit kemajuan partisipasi perempuan dalam politik. Namun, kemajuan partisipasi perempuan tersebut belum mencapai standar atau kuota 30% keterlibatan perempuan

dalam politik. Walaupun sebagian kecil perempuan terlibat dalam kontestasi politik, pertama-tama bukan karena kualitas diri dan kapabilitasnya melainkan keterlibatan perempuan dalam politik lebih didasarkan atas "rasa belaskasihan" dari laki-laki. Model pembangunan seperti ini, hanya menciptakan kemajuan dan perkembangan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemajuan hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, yang memiliki kekuasaan politik dalam pembangunan. Masyarakat kecil (miskin dan menderita), hanya dijadikan sebagai instrumen bagi langgengnya kekuasaan politik kelompok tertentu.

Orang-orang miskin dan menderita menjadi korban dari praktik pembangunan. Pembangunan yang mengesampingkan unsur humanitas merupakan pembangunan yang dikritik Peter L. Berger. Suatu etika politik pembangunan yang mengandalkan nilai-nilai etis tertentu. Pendekatan etika politik yang diajukan adalah suatu filsafat manusia yang memusatkan segala perhatiannya pada manusia yang seutuhnya konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah manusia yang menderita, baik dalam masa lampau maupun sekarang. Karena kebutuhan-kebutuhan fisik, psikis, kognisi, dan sosial dikorbankan demi tujuantujuan lain. Manusia diperalatkan demi kepentingan ideologis dan politis. Pembangunan yang mengesampingkan humanitas adalah inti kritik Berger.

Human costs (biaya-biaya manusiawi) serta social costs (biaya-biaya sosial) seperti ungkapan Berger: "Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah berkenaan dengan pengurangan penderitaan fisik maupun psikis. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan". Jadi, yang selalu harus diperhatikan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Penderitaan atau biaya-biaya manusiawi itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun tidak bisa dibenarkan.

Kemiskinan juga menyangkut tiadanya kebebasan politik dan keterbatasan ruang partisipasi yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Akibat kondisi di atas, kaum perempuan di Indonesia

berada dalam kondisi yang tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif. Dalam hal ini kemiskinan bukan hanya ketidakadilan untuk memperoleh pendapatan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya tetapi merupakan kondisi tidak adanya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hakhaknya.

Pembangunan yang mengabaikan unsur kebebasan partisipasi manusia dapat diformulasikan secara negatif, pembangunan berarti peniadaan ketidakbebasan, yang menghambat manusia untuk melakukan sesuatu. Peniadaan tersebut mesti mencakup minimnya dan terhambatnya akses pada kekuasaan politik dan ekonomi, ketidaksamaan kesempatan mendapatkan akses pada kekuasaan ekonomi, ketidaksetaraan gender. Konsep pembangunan seperti ini memungkinkan sekaligus memperhitungkan pendapatan bersamaan dengan banyak faktor lain yang ikut menopang kehidupan yang layak sebagai manusia. Dengan peningkatan kebebasan, manusia semakin mampu untuk mengungkapkan dan berusaha memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sepenuhnya tergantung pada manusia yang bebas. Dengan kebebasan yang dimilikinya, manusia dapat menentukan tujuan dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Dalam suatu kasus, ketiadaan kebebasan berdampak pada hilangnya hak politik dan sipil karena tindakan pemerintah yang otoriter. Pembatasan terhadap kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dengan kata lain, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, keterbelakangan perempuan adalah persoalan aksesibilitas. Keterbatasan akses mengakibatkan manusia tidak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial.

Pembangunan bersifat satu arah, yang dipakai untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kekuasaan politik dari kelompok tertentu. Namun, tidak dapat disangkal partisipasi perempuan dalam perpolitikan masih diwarnai oleh berbagai belenggu ketidakadilan. Salah satunya adalah praktik budaya patriarkat yang masih dominan dalam masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai pribadi yang kuat dan pantas terlibat dalam politik. Politik sejatinya ranah laki-laki sedangkan perempuan lebih pantas di rumah. Pandangan seperti ini, sebetulnya memposisikan atau menyudutkan perempuan dari kehidupan publik secara umum dan ranah politik secara khusus. Hal ini berujung pada jumlah keterwakilan mereka dalam birokrasi. Dengan kebebasan yang dimilikinya, perempuan dapat menentukan tujuan dan cara-cara yang lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhannya ketimbang saat dalam keadaan terbelenggu.

Karena itu, perempuan sebagai manusia yang bermartabat yang mempunyai tujuan dalam dirinya sehingga tidak begitu saja dikapitalisasi demi kepentingan apapun. Nilai terpenting yang menjadi pegangan dalam pembangunan adalah perhitungan penderitaan (calculus of pain) perempuan dalam berbagai dimensinya. Setiap pembangunan harus memperhitungkan makna (calculus of meaning) dalam setiap kebijakan politik. Sebab manusia (perempuan) berhak hidup dalam sebuah makna. Pembangunan sebagai politik niscaya membutuhkan partisipasi kognitif manusia dalam setiap pengambilan keputusan politik. Pembangunan pertama-tama adalah masalah politik yang menghendaki nilai-nilai tertentu. Dengan demikian pertimbangan nilai niscaya dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

- Ali, L. dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia Edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Verhoeven, TH L. dan Carvallo, Marcus. *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.

II. BUKU-BUKU

- Bahar, Saafroedin. Seri Hak Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindunganan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Bari, Farzana. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan pemerintahan*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.
- Berger, Peter L. dkk, *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadaran Manusia*. penerj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Berger, Peter L. *Humanisme Sosiologi*. terj. Dhakidae, Daniel. Jakarta: PN Inti Sarana Aksara, 1985.
- ----- *Kabar Angin Dari Langit*. penerj. Sudarmanto, J. B. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- ----- *Piramida Kurban Manusia*. penerj. A. Rahman Tolleng. Indonesia: LP3ES: Anggota IKAPI, 1982.
- Coleridge, Peter. *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. penerj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: "Oxfam" dan LP4C "Dria Manunggal" dengan Pustaka Pelajar, 1997.
- Dale, Cypri Jehan Paju, Kuasa, Pembangunan Dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia. Labuan Bajo: Sunspirit Books, 2013.

- Denar, Beni. Mengapa Gereja Tolak Tambang: Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis dan Teologis Atas Korporasi Tambang. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Dosi, Eduardus. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Gandhi, Mahatma. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Penerj. Siti Farida. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Hardiman, F. Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan.* Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- ----- Massa, Teror dan Trauma. Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Yogyakarta: Lamalera, 2011.
- Handoyo, Eko. dkk. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Jehalut, Ferdy. Paradoks Demokrasi: Telaah Analisis dan Kritik atas Pemikiran Chantal Mouffe. Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020.
- Kartini, Karton. Psikologi Wanita. Bandung: CV. Bandar Maju, 1992.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1974.
- Koesno, Moh. Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga, University Press, 1979.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik, Sebuah Analisis Atas Etika Politik* Aristoteles. Maumere: Ledalero, 2010.
- Lilijawa, Isidorus. Perempuan, Media dan Politik. Maumere: Ledalero, 2010.
- Madung, Otto Gusti. Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis. Maumere: Ledalero, 2013.
- ----- Negara, Agama dan Hak Asasi Manusia. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- ------ Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia.

 Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.

- Menoh, Gusti B. Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Müller, Johannes. Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Naim, Ngainun. dkk. *Pendidikan Multikutural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008.
- Ollenburg, Jane C. dan Helen A. Moore, *Psikologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Rikarno, Gusty. Feminisme Kahlil Gibran: Upaya Pembelaan Terhadap Martabat Perempuan. Yogyakarta: Atap Buku, 2018.
- Sadli, Saparinah. Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Suseno, Frans Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia. 1988.
- ----- Mencari Sosok Demokrasi. Jakarta: Gramedia, 1995
- T, Moeljarto. *Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Yayasan Obor Indonesia, *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Colleta, Nat. J. dan Kayam, Umar. Jakarta: Penerbit Obor: 1987.

III. ARTIKEL

- Daven, Mathias. Globalisasi Dan Pariwisata Sebagai Fenomen Kebudayaan. Dalam: Martin Chen & Frans Nala (Eds.), Peziarah di Bumi, Gereja dan Pariwisata Holistik. Jakarta: Obor, 2023.
- Donnelly, Jack. "Hak-Hak Asasi Manusia dan Nilai-Nilai Asia". dalam Frans Ceufin ed. *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Maumere: Ledalero, 2006.

- Mely, G. Tan. "Perempuan dan Pemberdayaan" dalam Achie Luhulima dkk, Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Jakarta: Penerbit Kompas, 1997.
- Müller, Johannes. "Pembebasan Manusia dari Penderitaan" dalam: Peter L. Berger, "Piramida Kurban Manusia". penerj. A. Rahman Tolleng. Indonesia: LP3ES; Anggota IKAPI, 1982.
- Suryakusuma, Julia. "Politik Sarung dan Susu: Perempuan dan Demokrasi Perempuan Indonesia di Era Orde Baru, Reformasi dan Era MOOI (Militerisme, Otoritarianisme, Oligarki dan Islamofasisme)", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, Herlambang P. Wiratraman. ed. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: Penerbit LP3ES, 2021.
- Warsito, Rukmadi. "Ketidakadilan Kemiskinan dan Birokrasi di Indonesia". dalam Mardimin, Johanes. ed. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2000.

IV. JURNAL

- Abraham, Nurcahyo. "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen". *Jurnal Agastya*, Vol. 6, No. 1, Januari 2016.
- Ahmad, Akhlaq. dkk. "Women in Democracy: "The Political Participation of Women". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 32, No. 2, 2019.
- Alie, Azizah dan Yelli Elanda, "Feminisasi Kemiskinan dan Daya Lenting Ibu Rumah Tangga di Kota Surabaya". *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.
- Arjani, Ni Luh. "Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki". *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol. 6, No.1, 2007.
- B, Fawziah Zahrawati. "Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan". *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Djiwandono, A. Sudiharto. "Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik". *ANALISA*, Vol. 13, No.3, Maret 1983.

- Hasanah, Ulfatun. "Gender dalam Dakwah untuk Pembangunan: Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik". Jurnal Ilmu Dakwah. Vol.38, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Hasanah, Ulfatun. dan Musyawak, Najahan. "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Politik pembangunan". Jurnal SAWWA, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017.
- Ilmar, Anwar. "Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis?". *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, Jakarta: Maret-Agustus 2017.
- Institute of South East Asian Studies, 1999, yang kemudian diterjemahkan menjadi *Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan*. Penerbit Mizan, 2000.
- Jovani, Audra. "Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Di Era Digital". Jurnal Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis, 2015.
- Nuraeni, Yeni. Suryono, Ivan Lilin. "Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia". *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, 29 Juni 2021.
- Nurhakki, "Budaya Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan. (Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Partai Politik)". *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Sekertariat Jenderal DPR RI, 2014. dalam Nurcahyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen". *Jurnal Agastya*, Vol. 6, No. 1, January 2016.
- Sobri, Muhammad. dan Nursaptini dkk."Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan". *Jurnal AL-MAIYYAH*, Vol. 12, No. 2, Desember 2019.
- Sofiana, Triana. "Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan". Jurnal Muwazah, Vol. 1, No. 1, Pekalongan, Januari-Juni 2009.
- Sulastri, Endang. "Representasi Perempuan Dalam Oligarki Partai Politik". *ICSGPSCI*, Vol. 3, No. 8, 2012.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang". *Kajian*, Vol. 25, No. 1, Maret 2020.

- Ustama, Dicky Djatnika. "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan". Jurnal "DIALOGUE" JIAKP, VOL. 6, No. 1, Januari 2009.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender". *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoretis". *Jurnal JISIPOL*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.

V. MANUSKRIP DAN MAKALAH

- Daven, Mathias. "Politik Pembangunan Peter Ludwig Berger". Manuskrip Kuliah IFTK Ledalero, Ledalero, 2022.
- Randjang, Paulus Heryo. "Kritik Terhadap Populisme Teknokratis Jokowi dan Populisme Kiri Menurut Chantal Mouffe". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.
- Retnowati, Yuni. "Hambatan Budaya Terhadap Partisipasi Politik Perempuan". Makalah, Akademi Komunikasi Indonesia, Yogyakarta, 2012.

VI. INTERNET

- Handayani, Rika. "Perempuan dan Partisipasi Politik Elektoral (Sebuah Tinjaun Sejarah)", dalam Humas Bawaslu Kota Bogor, https://bogorkota.bawaslu.go.id/perempuan-dan-partisipasi-politik-elektoral-dalam-tinjauan-sejarah/ diakses pada tanggal 26 Maret 2023.
- Naghdalyan, Hermine. "The feminisation of poverty" Armenia, Alliance of Liberals and Democrats, 27 April 2007. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11513&lang=EN#P185_18055 diakses pada tanggal 15 Mei 2023.
- Pangarso, Dwiputra, Nugel. "Hambatan Perempuan dalam Politik". dalam *Beranda Inspirasi*. https://berandainspirasi.id/hambatan-perempuan-dalam-politik/ di akses pada tanggal 24 April 2023.